

**TINJAUAN TERHADAP PENGATURAN *PRE INSTALL APPLICATION*
(*BLOATWARE*) DALAM PERANGKAT TELEPON SELULER MENURUT
SISTEM HUKUM INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP TYING
AGREEMENT DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA TELEPON
SELULER**

ABSTRAK

Komunikasi merupakan hal yang vital bagi kehidupan manusia. Seiring perkembangan jaman, alat komunikasi menjadi suatu kebutuhan bagi manusia saat ini. Salah satunya adalah telepon seluler. Perkembangan telepon seluler yang semula hanya digunakan sebagai alat komunikasi semata kini berubah mulai dari tampilan desain, aksesoris, hingga fitur telepon seluler yang kini di dalamnya terdapat suatu aplikasi. Di dalam telepon seluler terdapat 2 (dua) macam aplikasi yaitu: aplikasi yang otomatis diinstal oleh pihak produsen telepon seluler (*pre install application/bloatware*) dan aplikasi yang diinstal secara manual oleh pihak konsumen pengguna telepon seluler. Dalam kenyataanya keberadaan *bloatware* dalam telepon seluler bersifat permanen dan telah menimbulkan konsekuensi dan permasalahan hukum bagi konsumen pengguna telepon seluler, seperti Konsumen tidak memiliki haknya untuk memilih aplikasi mana yang menjadi kebutuhan dan keinginanya, berkurangnya kapasitas memori telepon seluler, energi baterai, kuota internet, hingga dapat terjadi bocornya data konsumen.

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang lebih mengacu pada bahan hukum primer berupa Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha No.5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian tertutup) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan pendekatan konseptual yang mengacu pada bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan pendapat para ahli. Untuk melengkapi penulisan skripsi ini, penulis melakukan wawancara berkaitan dengan permasalahan hukum mengenai *bloatware*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa terdapat indikasi produsen telepon seluler (pelaku usaha) melakukan perjanjian tertutup dalam bentuk perjanjian pengikatan dengan pelaku usaha lain dan terdapat hak-hak konsumen pengguna telepon seluler telah dilanggar akibat keberadaan *bloatware* dalam telepon seluler.

Penyertaan *bloatware* yang diikatkan dalam telepon seluler merupakan indikasi dari perjanjian tertutup dalam bentuk perjanjian pengikatan, dan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna telepon seluler dengan memperhatikan hak konsumen yaitu mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan telepon seluler. Namun hal tersebut belum spesifik mengatur sehingga diperlukan aturan yang lebih jelas dan spesifik serta upaya hukum yang dapat ditempuh melalui jalur pengadilan dan di luar pengadilan bagi konsumen pengguna telepon seluler yang hak-haknya telah dirugikan oleh produsen telepon seluler. Keberadaan *bloatware* belum menjadi perhatian bagi pemerintah dan rakyat Indonesia dikarenakan belum ada regulasi yang mengatur mengenai permasalahan hukum *bloatware* secara khusus, ditambah banyaknya konsumen yang mentoleransi kerugian akibat keberadaan *bloatware* dalam telepon seluler.

Kata Kunci: *Bloatware*, *Tied Product*, Perjanjian Pengikatan, Perlindungan Konsumen.

**THE REVIEW ABOUT REGULATION PRE INSTALL APPLICATION
(BLOATWARE) IN A CELLULER PHONE ACCORDING TO THE INDONESIAN
LEGAL SYSTEM ASSOCIATED WITH THE TYING AGREEMENT AND LEGAL
PROTECTION FOR CELLULER PHONE USERS**

ABSTRACT

Communication is vital for human life .As era development , a means of communication into a need for beings now .One of them is cellular phone .The development of cellular phone it is used as a means of communication is now changed start of a display design , accessories , until features cellular phone who is now at which there is an application .In cellular phone are 2 (two) kind of application namely: the automatic installed by producer cellular phone (pre install application / bloatware) and application who was installed manually by the consumers cell phone users .In fact the existence of bloatware in a telephone cellular permanent and had generated a consequence and legal issues for those cell phone users , as people did not having her right to choose application what the needs and want , reduced memory capacity mobile phone , Energize a battery , the quota the internet , until can occur the leakage of data consumers.

A method of writing used in writing thesis this uses the method juridical normative by adopting regulations that more reference on the material law primary in form of act number 5 of 1999 about prohibition of monopoly and unfair business competition, the act of number 8 of 1999 about consumer protection, and regulations industry competition supervision commission number 5 of 2011 on guidelines article 15 (agreement closed) the act of number 5 of 1999 on prohibition of monopoly and unfair business competition, and approach conceptual reference on the material law secondary of books, journals about law, opinion's expert. To furnish writing this thesis, writer interviewing relating to legal issues about bloatware. Based on the results of research conducted by writer that there is an indication producers cellular phone (business players) have an agreement closed in the form of a binding agreement with the other businesses and there are the rights of consumers cell phone users have been violated due to the existence of bloatware in a telephone cellular.

Participation bloatware fastened in a telephone cellular an indication of of an agreement closed in the form of a binding agreement, and legal protection of consumers cell phone users by taking into account the right consumers that is get comfort, security, and safety in using cellular phone. But it has not been specifically set up so that the necessary rules more clear and specific as well as remedy which can be reached through the Court and out of court for the consumer cell phone users that his rights have been harmed by mobile phone manufacturers. The existence of bloatware is not yet a concern for the Government and people of Indonesia because there is no regulation governing legal issues bloatware in particular, plus the large number of consumers who tolerate the loss due to the existence of bloatware in cellular phones.

Keywords: *Bloatware , Tied product , Tying Agreement , Consumer Protection.*

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian.....	I
Pengesahan Pembimbing.....	II
Persetujuan Panitia Sidang Ujian.....	III
Persetujuan Revisi.....	IV
Abstrak.....	V
<i>Abstract</i>	VI
Kata Pengantar.....	VII
Daftar Isi.....	X
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penulisan.....	12
D. Manfaat Penulisan.....	13
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	25

BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN JUAL-BELI TELEPON SELULER DAN PENGATURAN TYING AGREEMENT DALAM UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999

TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA

A.	Tinjauan Umum Perikatan dan Perjanjian.....	27
1.	Pengertian Perikatan.....	27
2.	Pengertian Perjanjian.....	30
3.	Hubungan Perikatan dan Perjanjian.....	34
4.	Syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	35
5.	Asas-Asas Perjanjian.....	38
B.	Tinjauan Hukum Persaingan Usaha.....	42
1.	Pengertian Persaingan Usaha dan Monopoli.....	42
2.	Asas dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha.....	48
3.	Pendekatan <i>Per Se Illegal</i> dan <i>Rule Of Reason</i> dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha.....	52
4.	Perjanjian yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha.....	54
C.	Konsep Perjanjian Pengikatan (<i>Tying Agreement</i>) Sebagai Bentuk Perjanjian Tertutup.....	66
1.	Pengertian <i>Tying Agreement</i> dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	66
2.	Latar Belakang Pelaku Usaha dalam Melakukan Perjanjian <i>Tying Agreement</i>	71

BAB III PENGATURAN *PRE INSTALL APPLICATION (BLOATWARE)* DALAM TELEPON SELULER

A.	Tinjauan Umum <i>Pre Install Application (Bloatware)</i>	75
1.	Pengertian <i>Pre Install Application (Bloatware)</i>	75
2.	Aplikasi dalam Telepon Seluler.....	79
B.	Perjanjian Jual-Beli Telepon Seluler.....	86
1.	Pengaturan Jual-Beli Telepon Seluler dalam Perundang-Undangan.....	86
2.	Keabsahan Jual-Beli Telepon Seluler	90
C.	Subjek Perjanjian Jual-Beli Telepon Seluler.....	95
1.	Konsumen Pengguna Telepon Seluler.....	95
2.	Produsen Telepon Seluler.....	100
D.	Konsekuensi Keberadaan <i>Pre Install Application (Bloatware)</i> yang diikatkan pada Produk Telepon Seluler.....	104

BAB IV TINJAUAN TERHADAP PENGATURAN *PRE INSTALL APPLICATION (BLOATWARE)* DALAM PERANGKAT TELEPON SELULER MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP TYING AGREEMENT DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA TELEPON SELULER

A.	Pengaturan Masalah <i>Bloatware</i> yang Diindikasikan Sebagai Perjanjian Tertutup Telah Terakomodir dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen <i>juncto</i> Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	110
1.	<i>Bloatware</i> yang Diindikasikan Sebagai Perjanjian Tertutup dalam Telepon Seluler.....	110

2. Pengaturan Masalah <i>Bloatware</i> yang Diindikasikan Sebagai Perjanjian Tertutup Diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	114
3. Pengaturan Masalah <i>Bloatware</i> yang Diindikasikan Sebagai Perjanjian Tertutup Telah Terakomodir dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	115
4. Kasus Microsoft yang Melakukan Praktek <i>Tying Agreement</i>	131
B. <i>Pre Install Application (Bloatware)</i> yang Sudah Dielaborasi dalam Telepon Seluler Diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	140
1. Hubungan Hukum Antara Konsumen Pengguna Telepon Seluler dan Produsen Telepon Seluler (Pelaku Usaha).....	140
2. Konsekuensi Keberadaan <i>Bloatware</i> dalam Telepon Seluler yang Merugikan Konsumen Pengguna Telepon Seluler.....	146
C. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Pengguna Telepon Seluler yang Mengalami Kerugian Akibat Keberadaan <i>Bloatware</i> Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dalam Perlindungan Konsumen.....	155
1. Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan.....	157
2. Penyelesaian Sengketa Konsumen di Pengadilan.....	164
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	171
B. Saran.....	176
DAFTAR PUSTAKA.....	178

CURRICULUM VITAE (CV)

MATRIKS REVISI

